



## Segera Benahi Aset

**PONTIANAK** - Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Zeet Hamdy Assovie meminta semua jajaran satuan kerja perangkat daerah segera menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di instansinya.

"Jangan mengulur-ulur waktu. Jangan sampai akibat lambatnya menyelesaikan persoalan malah

merugikan pemerintah daerah," ujar Zeet dalam acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait Pemeliharaan, Pengamanan, dan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah bagi Satker di Lingkungan Pemprov Kalbar, Kamis (7/11) di Hotel Kapuas Palace.

Zeet menuturkan semua pihak harus menanamkan rasa memiliki

dan rasa tanggungjawab. Jika hal tersebut dimiliki, semua persoalan dalam pengelolaan aset dapat diselesaikan segera. Semuanya pun dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Zeet, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

### Segera Benahi Aset

*Sambungan dari halaman 16*

dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini tersebut tidak diperoleh dengan muda.

"Semuanya butuh perjuangan dan kerja keras. Laporan keuangannya baik tetapi memiliki aset bermasalah, itu sama saja. Bahkan bisa mempengaruhi opini WTP yang diperoleh," ungkap mantan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalbar ini.

Zeet berharap semua jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dapat

mempertahankan opini WTP yang diperoleh tersebut. Semuanya harus dapat bekerjasama dengan baik dan saling mendukung dalam pengelolaan aset yang handal dan akuntabel. "Sehingga pada pemeriksaan tahun 2013 dan seterusnya kita mempertahankan opini WTP," katanya.

Selaku pengelola barang milik Daerah yang bertanggung jawab atas ketertiban pengelolaan barang milik daerah di seluruh satuan kerja perangkat daerah, Zeet meminta semua peserta bimbingan teknis rajin membaca

ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah. Hal ini agar lebih memahami tugas-tugas yang dilaksanakan.

"Dalam melakukan pencatatan dan penataan barang milik daerah, harus berpedoman kepada Permendagri Nomo 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan untuk menyusun neraca harus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, serta aturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan Aset," ungkapnya. (uni)